

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI KINERJA SEKSI MANAJEMEN DAN KEBUTUHAN LALU  
LINTAS JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PERAWATAN DAN  
PEMELIHARAAN FASILITAS LALU LINTAS JALAN  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**ANDREAN PUTRA FAJRI  
NPM : 157110383**

**PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andrian Putra Fajri  
NPM : 157110383  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan  
Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas  
Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan  
Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan  
Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 Juli 2020

An Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

( Nurmasari S.Sos., M.Si )

( Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si )

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

( Inura Safri, S.Sos., M.Si )

( Lilis Sufiani, S.Sos., M.Si )

v

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.



3. Lilis Suryani, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua Program studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Nurman., S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini. Semoga kebaikan yang beliau berikan dibalas oleh tuhan yang maha kuasa dengan kesehatan, rezeki dan kehidupan yang baik.
5. Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Terkhusus yang istimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Karyadi dan Ibunda Alm. Zubainar serta saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan saya di Prodi Administrasi Publik yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari.
8. Seluruh pegawai di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan Skripsi ini, dan juga kepada Masyarakat Kota

Pekanbaru yang berkenan memberikan keterangan yang penulis tanyakan dalam proses pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta nusa dan bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

***Wassalammualaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 30 Juli 2020  
Penulis  
Ttd

Andrean Putra Fajri

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRISPI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
1. Tujuan Penelitian.....	24
2. Kegunaan Penelitian.....	25
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	26
1. Konsep Administrasi.....	26
2. Konsep Organisasi.....	30
3. Konsep Manajemen.....	31
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	33
5. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	33
6. Konsep Kebijakan Publik.....	41
7. Konsep Kinerja.....	48
B. Penelitian Terdahulu.....	55
C. Kerangka Pikir.....	57
D. Konsep Operasional.....	59
E. Operasional Variabel.....	62
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Key Informan dan Informan.....	64

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan .....	65
E. Jenis dan Sumber Data .....	65
F. Teknik Pengumpulan Data .....	66
G. Teknik Analisa Data .....	67
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	68
<b>BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru .....	70
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	70
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru .....	71
3. Pemerintah Kota Pekanbaru .....	75
B. Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	78
C. Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kota Pekanbaru .....	82
<b>BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	85
B. Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru .....	86
1. Tugas .....	87
2. Fungsi .....	94
C. Faktor Kendala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru .....	107
<b>BAB VI :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
II.1	: Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Judul Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	55
II.2	: Operasional Variable Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	62
III.1	: Informan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru	64
III.2	: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru	69
IV.1	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2013	73
IV.2	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016	74
IV.3	: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Di Kota Pekanbaru	76
IV.4	: Tingkat pendidikan, golongan, dan jabatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	82
V.1	: Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Peringatan	5
I.2	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Larangan	6
I.3	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Perintah	7
I.4	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Perintah	7
I.5	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Petunjuk	8
I.6	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Petunjuk	9
I.7	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Tambahan	10
I.8	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Sementara	11
I.9	: Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Sementara	12
I.10	: Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru	15
I.11	: Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru	16
I.12	: Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru	17
I.13	: Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru	18
II.1	: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan	58
III.1	: Teknik Analisa Data Menurut Creswell Dalam Meneliti Judul Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi: Persyaratan Pengemudi Di Kota Pekanbaru)	48
IV.1	: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	115
2	: Daftar Wawancara Kepala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	126
3	: Daftar Wawancara Pihak Kontraktor Dengan Penelitian Evaluasi Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	138
4	: Daftar Wawancara Pengguna Jalan Di Kota Pekanbaru Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	144
5	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	149
7	: Dokumentasi Surat Penelitian Terkait Tentang Evaluasi Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru	155

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrean Putra Fajri  
NPM : 157110383  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juli 2020  
Penulis

Andrean Putra Fajri



**EVALUASI KINERJA SEKSI MANAJEMEN DAN KEBUTUHAN  
LALU LINTAS JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI DI  
BIDANG PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN  
FASILITAS LALU LINTAS JALAN  
DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Oleh  
Andrean Putra Fajri

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang evaluasi kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, hal ini dimana permasalahan yang penulis dapatkan di lapangan bahwa masih banyak rambu-rambu lalu lintas jalan dalam kondisi rusak dan tidak sesuai pada tempatnya, hal ini pastinya sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan pada pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang perawatan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan di kota pekanbaru. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dalam melakukan pengadaan dan juga perawatan bisa dinilai pada kategori “Cukup Baik”, hal ini dikarenakan didalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat untuk memaksimalkan penyediaan dan perawatan lalu lintas jalan, adapun kendala yang pertama adalah minimnya anggaran, dan yang kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk bekerjasama dalam menjaga fasilitas lalu lintas jalan. Jadi penulis berharap kepada Pemerintah agar menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan juga kepada masyarakat agar bisa bersama-sama dalam memelihara fasilitas rambu-rambu lalu lintas jalan yang sudah disediakan oleh Pemerintah.

Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Tugas, Fungsi, Perawatan, Pemeliharaan

***Performance Evaluation Of Section Management And Needs Traffic  
Traffic In The Relationship Service In Run Duties And Functions In  
Maintenance And Maintenance Road Facilities  
In The City Of Pekanbaru***

**ABSTRACT**

By  
Andrean Putra Fajri

*The problem raised in this study is about the evaluation of the performance of the Management Section and Road Traffic Needs, this is where the problem that the author gets in the field is that there are still many road traffic signs in a damaged condition and are not in place, this is certainly very influential to the safety and comfort of road users. This study aims to evaluate the extent of the performance of the Management Section and Road Traffic Needs at the Department of Transportation in carrying out their duties and functions in the field of maintenance and maintenance of road traffic facilities in the city of Pekanbaru. In conducting this research, researchers used a type of descriptive survey, with the type of qualitative research, qualitative research are methods to explore and understand the meaning by a number of individuals or groups of people ascribed to social or humanitarian problems. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the performance of the Management Section and Road Traffic Needs in conducting procurement and maintenance could be assessed in the category of "Good Enough", this was suggested in its implementation that there were several obstacles which became an inhibiting factor to maximize the supply and maintenance of traffic. road traffic, as for the first obstacle is the lack of budget, and the second is the lack of awareness from the community to work together in maintaining road traffic facilities. So the authors hope to the Government to provide a budget that is in accordance with the needs in the field, and also to the community so that they can jointly maintain road traffic signs provided by the Government.*

*Keywords: Evaluation, Performance, Tasks, Functions, Care, Maintenance*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Henry C. Black (dalam Thontowi 2006;02) mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Negara merupakan suasana ideal yang di cita-citakan dan bersifat abstrak, tujuan Negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mencerminkan dari rumusan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.



4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003 : 7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil. Oleh karena itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti Indonesia.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014).

Rambu lalu lintas merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi para pengguna jalan sebagai alat penyampai informasi di jalan, oleh karena itu dalam letak dan perawatannya harus diperhatikan dengan baik dan benar, tetapi dalam kenyataan banyak rambu-rambu lalu lintas yang rusak dan tidak terawat, ini bisa diakibatkan karena tangan usil dari pengguna jalan seperti mencoret-coret dan menempelkan stiker iklan atau karena faktor alam seperti tertutup daun yang mengakibatkan tidak terlihat dan kusam, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan, dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab lainnya. Semua ini butuh perhatian dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang memang bertanggung jawab dalam hal pemasangan, perawatan dan perbaikan rambu-rambu lalu lintas, apalagi pada Kawasan Tertib Lalu Lintas yang merupakan wilayah padat pengguna jalan dan daerah yang di awasi dalam hal perilaku pengguna jalannya. Dan sebab itu rambu lalu lintas harus selalu di perhatikan baik dalam pemasangan maupun dalam hal perawatan yang tepat waktu agar informasi di jalan tersampaikan dengan baik kepada pengguna jalan.

Untuk mengetahui jenis-jenis fasilitas lalu lintas yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan beberapa jenis fasilitas jalan yang seharusnya disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Rambu lalu lintas menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 diartikan: “salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.”

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rambu lalu lintas adalah fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi keadaan yang akan di lalui di depan dan sebagai tanda peringatan kepada pengemudi. Sementara itu, untuk jenis-jenis fasilitas rambu lalu lintas yang tersedia sebagai pelengkap jalan raya khususnya di Kota Pekanbaru, maka dapat di lihat pada penjelasan yang akan penulis sajikan pada pembahasan di bawah ini:

Adapun beberapa jenis fasilitas rambu lalu lintas yang terdapat di jalan sebagai pelengkap sarana dan prasarana jalur lalu lintas jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan terbagi menjadi 6 kategori, dimana kategori tersebut adalah, Rambu Peringatan, Rambu Larangan, Rambu Perintah, Rambu Petunjuk, Rambu Papan Tambahan dan Rambu sementara, untuk penjelasannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini:

#### **1. Rambu Peringatan.**

Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan., warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Contoh dari rambu peringatan dapat di lihat pada penjelasan gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Peringatan.**



*Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.*

Pada gambar dapat dilihat jenis-jenis rambu lalu lintas dengan jenis rambu peringatan, dimana pengemudi diberikan peringatan untuk lebih berhati-hati dengan kondisi yang sedang terjadi di depannya, contohnya saja peringatan tentang tikungan, jembatan, penurunan, pendakian, jalan licin, jalan cembung atau peringatan tentang lontaran kerikil yang ada di jalan tersebut.

## **2. Rambu Larangan.**

Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu lalu lintas dengan perintah larangan ini adalah rambu yang memiliki warna merah, dimana rambu yang menyuruh kita agar tidak melakukan suatu tindakan atau hal yang ada di rambu jalan tersebut. Juga sebuah peringatan kepada kita supaya kita taat dan tidak melakukannya di area tanda tersebut. Untuk melihat contoh dari rambu-rambu perintah larangan tersebut, maka penulis akan menyajikannya di bawah ini.

**Gambar 1.2 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Larangan.**



*Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.*

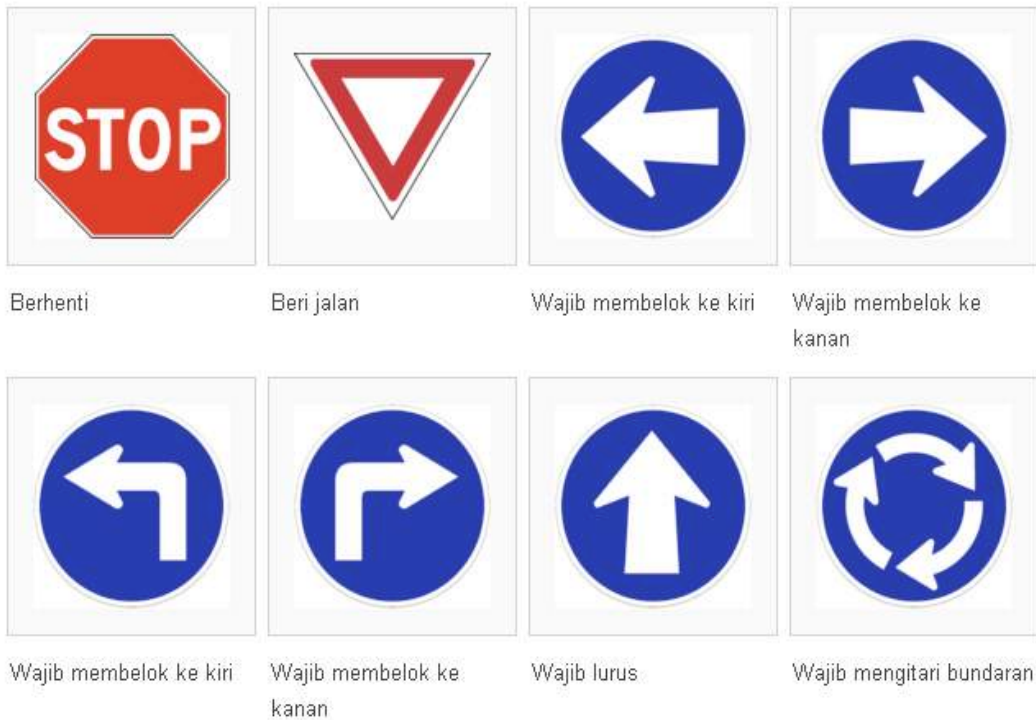
Pada gambar di atas dapat dilihat beberapa contoh gambar yang memberikan perintah larangan untuk pengendara di jalan raya, ciri khas dari rambu ini adalah berwarna merah dengan tulisan atau gambar dan logo berwarna hitam yang diikuti beberapa penjelasan lainnya.

### **3. Rambu Perintah.**

Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan, rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah, rambu lalu lintas perintah adalah rambu yang menyuruh kita untuk mengikuti apa yang ada dalam rambu tersebut. Bila larangan adalah suatu rambu yang tidak membolehkan kita untuk melakukan suatu tindakan, maka rambu ini adalah rambu yang mewajibkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan rambu tersebut.



**Gambar 1.3 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Perintah.**



Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.

**Gambar 1.4 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Perintah.**



Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.

#### 4. Rambu Lalu Lintas Dengan Kategori Petunjuk.

Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih. Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil.

Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang atau tulisan warna putih, Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.

**Gambar 1.5 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Petunjuk.**



Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.

**Gambar 1.6 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Petunjuk.**



Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.

### 5. Rambu Lalu Lintas Dengan Kategori Rambu Tambahan

Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 sentimeter sampai dengan 10 sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu. Persyaratan papan tambahan :

1. Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.

2. Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
3. Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pengguna jalan.
4. Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua).

**Gambar 1.6 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Tambahan.**

Lambang Rambu	Arti Rambu
	Jarak dari rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya atau awal daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud
	Panjang bagian jalan yang berbahaya atau panjang daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud
	Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri 10 meter
	Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri dan kanan 5 meter
	Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kanan 10 meter
	berlakunya rambu sesuai dengan keterangan pada papan tambahan
	Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalulintas ke depan

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.

Pada gambar di atas dapat di jelaskan bahwa rambu tambahan ini berfungsi untuk memberikan keterangan atau perintah untuk sebuah kondisi dimana rambu



tersebut hanya berlaku untuk beberapa kategori saja, dan atau memberikan penjelasan terkait dengan perintah dari rambu utama seperti dilarang lewat, pada penjelasan di bawahnya diberikan keterangan “Khusus Untuk Angkutan Berat”.

### **6. Rambu Lalu Lintas Dengan Kategori Rambu Sementara**

Rambu lalu lintas sementara digunakan untuk keadaan dan kegiatan tertentu.

Rambu ini biasanya dipasang untuk memberi informasi adanya:

- a. Jalan rusak
- b. Pekerjaan jalan
- c. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional
- d. Tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas
- e. Pemberian prioritas pada pengguna jalan
- f. Bencana alam
- g. Kecelakaan lalu lintas
- h. Berbagai kegiatan, seperti keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan budaya.

Rambu lalu lintas sementara dapat berupa rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Rambu ini memiliki bentuk, lambang, warna, arti, ukuran dan rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu yang sama dengan rambu lalu lintas yang ditempatkan secara tetap. Namun bedanya, rambu lalu lintas sementara dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan dan dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai keadaan atau kegiatan tertentu.

Contoh dari rambu sementara ini dapat dilihat pada gambar di bawah:

**Gambar 1.7 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Sementara.**



Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019.

**Gambar 1.8 Fasilitas Rambu Lintas Dengan Kategori Rambu Sementara.**



Sumber : Dokumentasi Tambahan Dari Internet, 2019.

Pada gambar di atas dijelaskan bahwa rambu sementara dapat di posisikan pada situasi tertentu dan bersifat sementara, khususnya dalam proses pembangunan, atau fungsi jalan yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

Didasari pada penjelasan dan penyajian jenis-jenis fasilitas lalu lintas di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya Kota Pekanbaru, dan yang menjadi focus penelitian penulis

adalah pemasangan rambu-rambu tersebut di lingkungan jalan raya Kota Pekanbaru, berdasarkan pengertian tentang rambu lalu lintas yang telah di sebutnya pada pembahasan sebelumnya, yaitu “rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.” keberadaan rambu lalu lintas tersebut harus dipasang menurut aturan-aturan, dimana dalam peraturan tentang lalu lintas yang terdapat pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa pemasangan rambu lalu lintas harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut.

1. Dibuat menurut ukuran dan desain teknis yang sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan tertentu.
2. Dipasang dengan benar agar dapat terlihat jelas dan terbaca oleh pengguna jalan.
3. Ada dalam jarak pandang dan waktu yang cukup untuk memberikan reaksi bagi pengguna jalan.
4. Dapat menyampaikan informasi dengan jelas.

Saat ini, kinerja organisasi terutama organisasi publik mendapat sorotan dari masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat mulai kritis dalam menilai atas pelayanan yang diberikan terutama oleh organisasi publik, masyarakat mulai menuntut kepada setiap organisasi publik dalam memberikan pelayanan umum, baik berupa barang atau jasa, agar lebih profesional dan berkualitas kepada setiap anggota masyarakat. Pelayanan



yang lebih profesional dan berkualitas merupakan wujud dari good governance (tata pemerintahan yang baik), terutama dalam pelayanan publik.

Bagus atau tidaknya suatu kinerja dari organisasi publik dapat diketahui dengan melakukan suatu pengukuran, hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi tersebut, misalnya lingkungan organisasi, budaya yang ada dalam organisasi, sarana dan prasarana, penilaian kinerja dan umpan balik. Pengukuran atau kinerja pada suatu organisasi yang memiliki output dalam bentuk barang, dapat dilihat dari kuantitasnya yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau seberapa lama barang tersebut dapat dihasilkan. Sementara kinerja pada suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan atau kualitas pelayanan yang diberikan suatu organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001 : 67). Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.

Dinas perhubungan adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas angkutan jalan, transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*publik service*), penunjang kegiatan ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah, salah satu bidang transportasi yang memerlukan



perhatian lebih yakni penyediaan sarana dan prasarana dari kondisi rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru saat ini.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, prasarana lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujud nya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian di Kota Pekanbaru, umumnya tentunya skala Nasional.

Berdasarkan hasil Pra-Survey yang telah penulis lakukan dilapangan, khususnya dalam hal kondisi fasilitas rambu lalu lintas yang ada saat ini di Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan beberapa permasalahan terkait kondisi yang terjadi dilapangan, dimana diantaranya: kurang tersedianya keberadaan fasilitas rambu lalu lintas di jalanan Kota Pekanbaru, Kurang terawatnya kondisi rambu lalu lintas yang telah tersedia, tidak adanya perbaikan terhadap rambu lalu lintas yang rusak, dengan alasan tersebut dan dikaitkan dengan penjelasan tentang fasilitas rambu lalu lintas di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan di Kota Pekanbaru.

Sebagai bentuk dokumentasi awal terhadap kondisi ketersediaan fasilitas rambu lalu lintas yang tersedia di jalanan Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikan foto yang penulis dapatkan dilapangan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.8 Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru**



*Sumber : Data Dokumentasi Penulis Dilapangan, Tahun 2019*

Dokumentasi yang penulis sajikan di atas merupakan salah satu dokumentasi yang berhasil penulis dapatkan dilapangan terkait dengan kondisi rambu lalu lintas yang ada di Jl.Imam Munandar, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam foto tersebut dapat dilihat kondisi rambu lalu lintas yang sudah rusak dan tidak dapat memberikan informasi secara baik kepada pengendara yang melewati daerah tersebut, hal ini tentunya dapat membahayakan pengendara jalan khususnya di malam hari dan dalam kondisi hujan turun, karna berdasarkan rambu tersebut, mengartikan bahwa hambatan yang ada didepannya adalah jalan yang menyempit.

**Gambar 1.9 Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru**



Sumber : Data Dokumentasi Penulis Dilapangan, Tahun 2019

Pada gambar di atas, dapat dilihat kondisi dari Rambu Lalu Lintas yang tersedia di pinggir jalan, dimana fasilitas rambu lalu lintas tersebut sudah tidak lengkap lagi, papan yang memberikan peringatan atau jenis rambu lalu lintas sudah tidak ada lagi pada tiangnya, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa pengendara tidak akan mendapatkan informasi apapun terkait dengan kondisi jalan yang ada di daerah tersebut.

**Gambar 1.10 Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru**





*Sumber : Data Dokumentasi Penulis Dilapangan, Tahun 2019*

Keterangan yang dapat penulis sampaikan terkait dengan kondisi yang ada pada gambar foto di atas adalah, rambu lalu lintas sudah tidak terlihat lagi dengan jelas dikarenakan tertutup oleh debu atau kotoran lain yang menempel di papan rambu, dengan demikian maka pengendara tidak akan dapat melihat situasi rambu lalu lintas dengan jelas, dampaknya tentu akan memberikan ancaman bahaya kepada pengendara di jalan tersebut.

**Gambar 1.11 Dokumentasi Terkait Kondisi Rambu Lalu Lintas di Jalanan Kota Pekanbaru**





*Sumber : Data Dokumentasi Penulis Dilapangan, Tahun 2019*

Pada gambar di atas dapat dilihat kondisi dari rambu lalu lintas yang ada di JL. Lintas Timur, Kecamatan Tenayan Raya, rambu lalu lintas dengan jenis Traffic Light tersebut sudah tidak berfungsi lagi, dan hal ini sudah dibiarkan cukup lama oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, tentunya pembiaran seperti ini akan berdampak kepada fungsi yang seharusnya didapatkan pengguna jalan.

Rambu lalu lintas yaitu suatu bagian dari fasilitas jalan umum yang berupa lambang, huruf, angka, dan kalimat yang di dibuat menggunakan memakai papan dan sejenisnya yang ada di pinggir jalan, supaya bermanfaat setiap waktu, material untuk tiang dan papan rambu lalu lintas yaitu yang dapat memantulkan

sinar atau cahaya ketika saat keadaan gelap, dengan maksud tujuan yaitu agar pengendara yang melalui jalan bisa tetap melihat simbol rambu lalu lintas yang sudah terpasang walaupun kondisi gelap. Khisty dan Lall,(2005: 278)

Pada intinya fungsi rambu lalu lintas adalah untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan, jika di spesifikasi lagi fungsi dari rambu lintas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberiksn informasi kondisi jalan.
2. Memberikan informasi keadaan lalu lintas.
3. Untuk mendukung kampanye keselamatan lalu lintas.
4. Sarana informasi saat sedang ada perbaikan jalan.

Fungsi-fungsi di atas adalah faktor-faktor yang bisa mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan. Jadi, rambu lalu lintas merupakan hal yang bermanfaat bagi pengendara atau pengguna jalan. Khisty dan Lall,(2005: 278)

Dengan mengetahui manfaat dari rambu lalu lintas tersebut, diharapkan berguna bagi kelancaran para pengguna jalan. Karena dapat mengatur dan mengantisipasi terjadinya kemacetan. Rambu lalu lintas merupakan petunjuk atau pengarahan yang positif bagi para pengguna jalan, sehingga mengurangi pengambilan keputusan yang salah bagi pengemudi. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan para pengguna jalan diharapkan mengerti maksud dari rambu dan menjalankan sesuai dengan petunjuknya. Dengan adanya rambu lalu lintas, maka sangatlah memberikan kemudahan bagi pengguna jalan selain jelas juga sangat efisien untuk mengatur lalu lintas. (Hobbs, 1995:559)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yang tertera dalam pasal 191

tentang “Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dilakukan Dinas Perhubungan dan pasal 194 ayat (2) yaitu tentang penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Di dalam menjalankan tugas nya, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki Tugas dan Fungsi sebagai acuan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, adapun Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (*Sumber : Renstra Dishub Kota Pekanbaru 2018*)

Adapun bidang yang lebih berwenang dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang di tangani oleh Bidang Manajemen Dan Kebutuhan



Lalu Lintas Jalan dan Perairan. Dan adapun tugas dan fungsi dari Seksi ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari hari mendatang.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
  - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  - e. Penyelenggaraan, pengoordinasian, mengevaluasi analisa dampak lalu lintas bangunan-bangunan yang berdampak.
  - f. Pelaksanaan kajian dan mengevaluasi, kinerja pelayanan ruas jalan dan persimpangan serta penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan.
  - g. Perencanaan dan mengevaluasi manajemen pembatasan lalu lintas kendaraan.
  - h. Pelaksanaan pembangunan dan penentuan lokasi, pengadaan baru, evaluasi kondisi Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Paku Jalan dan traffic light, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai



Jalan serta Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Jalan dan Perairan.

- i. Pelaksanaan survey-survey lalu lintas jalan dan persimpangan.
- j. Perencanaan dan mengevaluasi arah arus lalu lintas, sirkulasi lalu lintas dan pengendalian pembebanan ruas jalan.
- k. Perencanaan dan mengevaluasi manajemen penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dan kebutuhan lalu lintas lainnya.
- l. Pemberian izin penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dan rekomendasi besaran tarif parkir.
- m. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- n. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan gambaran-gambaran umum yang telah penulis paparkan di atas dan juga di dukung dengan beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian, dan dalam melaksanakan sebuah penelitian maka seorang peneliti harus terlebih dahulu menemukan fenomena-fenomena permasalahan yang ingin di teliti, maka dalam penelitian ini penulis akan menyajikan permasalahan yang penulis jumpai di lapangan pada fenomena empiris dan berdasarkan gambaran pada latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas maka penulis mendapatkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, dan didukung dengan pemberitaan yang ada di media-media kota Pekanbaru, penulis menemukan fenomena bahwa kondisi sarana prasarana fasilitas rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru yang tidak terawat, hal ini bisa di lihat pada hasil dokumentasi penulis pada gambar 1.8 menemukan rambu-

rambu yang rusak, gambar 1.9 penulis menemukan rambu-rambu tertutup pohon, pada gambar 1.10 penulis mendapati rambu rambu tidak berada di tempat yang seharusnya yaitu diluar jalur jalan, dan pada gambar 1.11 penulis melihat rambu-rambunya sudah hilang atau sudah rusak dan perlu perbaikan atau pergantian. Selain itu Kondisi jalan dikota Pekanbaru masih banyak yang tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas jalan yang mana hal ini sangat mempengaruhi kondisi keamanan masyarakat dalam berkendara di jalan raya.

2. Terindikasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum menjalankan proses pengawasan dilapangan, sehingga masyarakat terbiasa melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan yang rambu lalu lintasnya mengalami kerusakan atau tidak terawat. Akibatnya dapat terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang di atas serta fenomena-fenomena yang telah disajikan yang mana berkaitan dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti pada pembahasan penulisan Usulan Penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru?

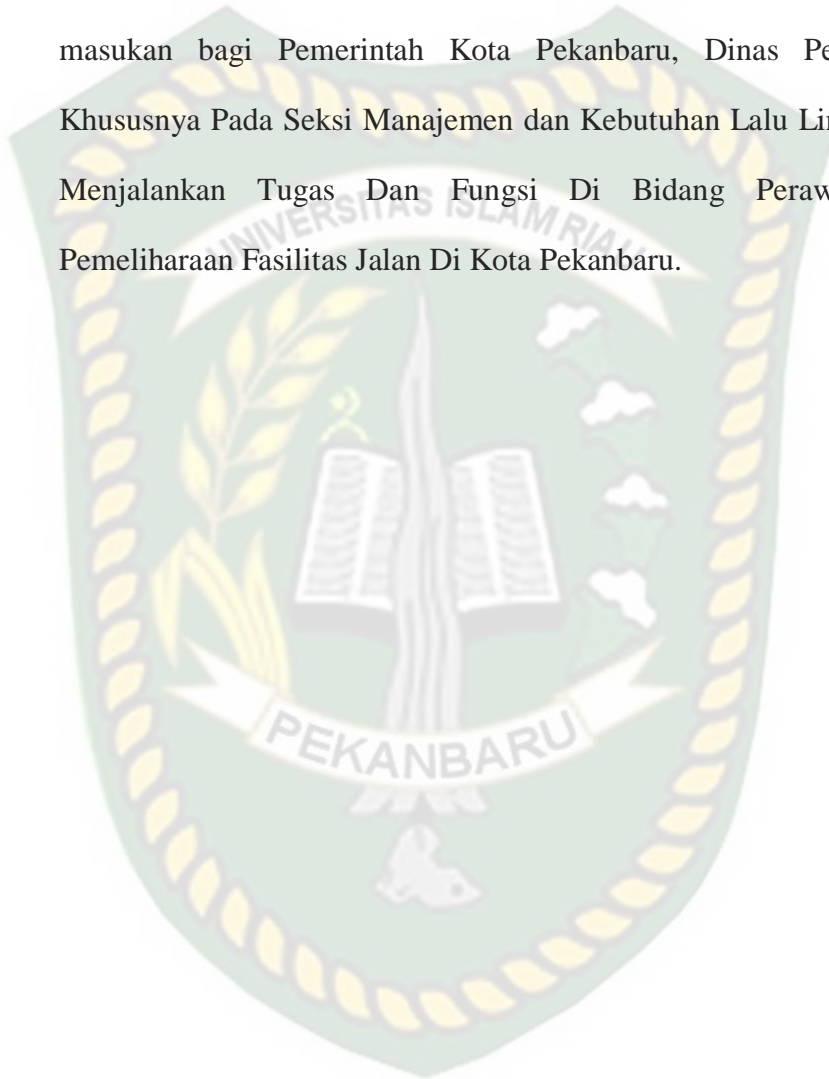
2. Apa saja kendala yang dihadapi Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan Di Kota Pekanbaru.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah untuk:
  - a. Untuk menganalisis Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan Di Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan Di Kota Pekanbaru.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:
  - a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu Administrasi, khususnya tentang peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik seperti Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
  - b. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya dengan jenis penelitian yang sama yaitu terkait pembahasan tentang Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan

Tugas Dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan Di Kota Pekanbaru.

- c. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Khususnya Pada Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan Di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

#### 1. Konsep Administrasi

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011 ;7) Administrasi dapat diartikan sebagai cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi.

Menurut Siagian (2003 ; 2), Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukannya organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, mengacu kepada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu.keterangan itu cenderung di manfaatkannya untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya.

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli,2009;9) misalnya terpaksa harus merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut :

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statuta yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuannya (*goals*), usahanya, sumber pendanaanya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang mengerakan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
- d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masing-masing hirarki organisasi tergambar dalam batasan berikut ini. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana yang di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan

sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Silalahi (dalam Zulkifli,2009;10) Terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi tersebut.

- a. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi,waktu dan tempat dimana dia di jalankan.
- b. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; adanya pertimbangan rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut di atas.
- c. Bahwa administrasi sebagai sesuatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan semenjak manusia mengenal peradapan. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh herbert A. Simond (Zulkufli 2009;11) yaitu apabila ada dua orang yang bekerja bersama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat di gulingkan hanya oleh seseorang diantara mereka,pada saat itu administrasi telah ada.

Dalam aspek studi ilmu administrasi negara ada beberapa prinsip-prinsip umum yang harus dipahami dan di implementasikan oleh para administrator. Hendri Fayol (dalam Zulkifli, 2005;71) merumuskan 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja (*defesien of work*) dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang dalam bidangnya (*spesialisasi*) agar memperoleh efisiensi tertinggi.
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) wewenang merupakan hak administrator atau menejer untuk memberikan perintah dan merupakan suatu yang melekat

- dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggung jawab, baik bagi yang memberi maupun yang menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab perlu untuk dipertimbangkan.
- c. Disiplin (*discipline*) merupakan hal yang mutlak dalam hal kegiatan kerja sama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan menaati peraturan yang telah di tetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
  - d. Kesatuan perintah (*unity of command*) pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pimpinan (atasan).
  - e. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*) bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh manajer.
  - f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) di atas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*) dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
  - g. Pengupahan dan penggajian (*remuneration*) pengkajian dalam metoda pembayarannya harus adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
  - h. Sentralisasi (*centralization*) wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan tetapi tanggung jawab akhir tetap di pegang oleh pimpinan puncak (top manajer) masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan, atau dipusatkan.
  - i. Skala hiarki (*scala skain*) merupakan garis wewenang dan program yang di turunkan dari pinpinan puncak kebawah dan pekerja.
  - j. Tata tertip (*order*) penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.



- k. Keadilan (*euty*) kesetiaan dan pengabdian anggota harus di imbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
- l. Stabilitas jabatan (*stability of tunere*) memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
- m. Prakarsa atau inisiatif (*initiatife*) dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oelh perkembangannya prakarsa dan karenanya kepada bawahaan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktifitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- n. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit decorps*) prinsip ini menitik beratkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerja sama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

## 2. Konsep Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa oraganisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah. Menurut Ancok (2012;21) organisasi sebagai tempat bagi sejumlah manusia untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan bersama dalam sebuah kelompok.

Menurut Torang (2013; 25) Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama .

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta cara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang /sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2008;6).

Definisi konsep administrasi dalam arti luas ber titik tolak dari pendekatan multi aspek dan dimensi yang melekat dengan aktivitas organisasi itu. Pendekatan demikian melatar belakangi beragam redaksionis definisi organisasi yang telah di tulis. Siagian (dalam Zulkifli 2009;14). Merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukandalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang di sebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

### **3. Konsep Manajemen**

Menurut Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Terry (dalam Budiyono, 2004;7) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen. Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu.

- a. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat di pengaruhi dan di dukung oleh sifat-sifat dan bakat.
- b. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan keberhasilan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep menejemen.

Definisi konsep manejemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

#### **4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktifitas, secara umum sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bisa di kelompokkan atas 2 macam yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sumber Daya Non-Manusia.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan, 2012;10) Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia bila di uraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan mendorong Sumber Daya Manusia untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan organisasi dimasa sekarang dan di masa yang akan datang.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula di lihat sebagai suatu pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia. (Siswanto, 2011;7).

#### **5. Konsep Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah di lakukan dan akan di gunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan



mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Secara teoritis, penilaian kinerja implementasi suatu kebijakan atau program dapat dilakukan atas dasar waktu pelaksanaannya. Pertama adalah evaluasi *ex-ante*. Evaluasi jenis ini dimaksudkan untuk mengetahui layak tidaknya suatu kebijakan atau program untuk diimplementasikan. Dari segi waktu pelaksanaan, evaluasi ini dilakukan sebelum kebijakan atau program diimplementasikan. Kedua adalah evaluasi yang disebut sebagian *going process evaluation* atau yang juga terkenal dengan nama *monitoring*. Evaluasi jenis ini dilakukan pada waktu kebijakan atau program sedang berjalan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah keluaran kebijakan sampai kepada kelompok sasaran dengan tepat berbagai indikator tepat, seperti: tepat pada waktu pelaksanaan seperti yang dijadwalkan, tepat sasaran seperti yang digariskan dalam dokumen kebijkaan, tepat jumlah atau volume output yang harus diterima kelompok sasaran, dan sebagainya. Ketiga adalah *ex-post evaluation*, yaitu kegiatan evaluasi untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi jenis ini dilakukan setelah suatu kebijakan atau program selesai diimplementasikan. Focus uatam evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan kondisi kelompok sasaran antara sebelum dan sesudah kebijakan atau program diimplementasikan. (Purwanto, 2015:113),

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu di tunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Adapun menurut Siagian (2005 : 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- 1) Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- 2) Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- 3) Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Adapun langkah-langkah Evaluasi yang dapat dilakukan menurut teori Ndraha (2003;185) adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Standar (kendali,s) beberapa standar, dan solen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.
2. Memantauan factor (f)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil Perbandingan  $F=S, F<S, FS$ .
5. Analisa Perbandingan berdasarkan model-model di atas.
6. Tindak Lanjut.
  - a. Tindak Korektif
  - b. Tindak Afirmitif
  - c. Feedback.

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008;2), bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya Winarno (2007: 230) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di Evaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126), mencakup lima indikator yaitu:

- a. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
- c. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
- d. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
- e. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
- f. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Menurut Sondang P. Siagian (2002: 147) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.



Menurut Nurcholis (2005 : 274) Evaluasi kebijakan publik adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, *outputs* dan *outcomes* dari kebijakan pemerintah daerah. Kemudian menurut Subarsono (dalam Agus, 2014 : 27) Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi aru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Sedangkan Menurut Indiahono (2009:145) Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil.

**a. Jenis-jenis Evaluasi.**

Jika di lihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat di bagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan.

Kata evaluasi sering di gunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternative dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin di capai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan

rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang di nilai dengan yang di analisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding rencana tapi hasil pelaksanaan disbanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

**b. Proses Evaluasi**

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus di dasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek ridak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi. Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tuga-tugas evaluasi, antara lain:

- a. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
- b. Pengertian dan konotasi yang serng tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus di hindari.
- c. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil

telah di cantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.

- d. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
- e. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu di konsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program
- f. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

### c. Fungsi Evaluasi

Wahab (2002;51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

- a. Evaluasi member informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat di capai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- b. Evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan

program itu sendiri dapat di lihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi, yaitu:

- a. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah di capai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
- b. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
- c. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat di jelaskan

## **6. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi



untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan. Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2008 : 7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan), dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.

- b. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.
- c. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statement* atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administrative, pendapat pengadilan, dan sebagainya.
- d. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.
- e. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik

tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429). Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

“Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat



efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

#### c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun. (Dunn, 2003:430-431)



Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. “Dunn pun mengemukakan bahwa: Kriteria responsivitas adalah

penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

#### f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

### 7. Konsep Kinerja

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Gilbert (1997) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Murphy (1990) menyatakan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat bekerja. Sedangkan Widodo (2006:78) mengatakan

bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian,2001:329). Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa:

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu” (Hasibuan, 2001:34)

Menurut Fahmi (2013: 127) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu, sedangkan menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Sedangkan menurut Amstrong dan Baron (Wibowo, 2008: 7), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Bernardin dan Russel (Ruky, 2002: 15) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut : *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”*. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu, dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau



hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu, dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Handayani (2004: 19), mengartikan bahwa kinerja merupakan cara menjalankan tugas dan hasil yang diperoleh. Kinerja adalah cara atau tindakan dimana suatu tindakan atau tugas dilakukan. Kinerja dapat pula diartikan sebagai setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu.

Mengusulkan bahwa paling tidak, ada tiga konsep yang adapat digunakan sebagai indikator kinerja organisasi pemerintah yaitu, responsibility (responsibilitas), responsiveness (responsif), dan accountability (akuntabilitas. Dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah (birokrasi publik) disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Menurut Snelbecker (dalam Moleong, 2002 : 34) mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Menurut (Fahmi, 2011:2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang di hasilkan selama satu periode waktu. Lalu pengertian kinerja menurut (Mahsun, 2006:25) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi.



(Mangkunegara, 2007:9) mengemukakan bahwa kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas nya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.

Kinerja adalah suatu kata dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing “prestasi”. Bisa pula berarti “hasil kerja”. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara dalam (Widodo, 2005:206) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi.

Keban (2004:191) istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan untuk kerja” atau prestasi. Dalam praktek pengukuran kinerja seringkali dikembangkan secara ekstensif, instensif, eksternal. Pengembangan kinerja secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang diikutsertakan dalam pengukuran kerja, sedangkan pengembangan secara eksternal diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja. Keban, (2004:192) pemikiran seperti ini sangat membantu untuk dapat lebih secara valid dan objektif melakukan penilaian kinerja karena lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan lebih banyak pihak yang terlibat dalam penilaian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan lain bahwa makna kinerja menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan.

### a. Indikator Kinerja

Mengukur kinerja pegawai dapat dilakukan melalui indikator kinerja, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu hasil yang dicapai. Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2014: 178-179) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
- b. Kualitas layanan, cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik pada kualitas.
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit.
- e. Akuntabilitas, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

Sementara menurut Kumorotomo dalam Pasolong, (2014: 180) indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, yaitu:

#### a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara

objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

b. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastian. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Menurut Mahmudi (2010: 155-156), indikator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi pegawai ataupun organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Secara umum, indikator kinerja memiliki peran antara lain:

- a. Membantu memperbaiki praktik manajemen.
- b. Membantu memperbaiki praktik manajemen
- c. Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan pengendalian. Memberikan.

- d. Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja disemua level organisasi.
- e. Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf.

**b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja**

Menurut Armstrong dan Baron (Wibowo, 2011: 100), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. Personal faktor, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
- b. Leadership faktor, ditentukan oleh kualitas, dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c. Team faktor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
- d. System faktor, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi.
- e. Contextual/situational faktor, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Dari pendapat ahli di atas dapat dilihat ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari kinerja seorang pegawai adalah tingkat keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Apabila seorang pegawai memiliki tingkat keterampilan dan kompetensi yang tinggi maka kinerja dari pegawai juga akan baik. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat keterampilan dan kompetensi pegawai rendah maka kinerjanya juga akan ikut terpengaruh menjadi memiliki kualitas yang rendah.



## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Judul Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru**

1	2	3
1	Nama	Sigit Prasetyo
2	Judul Penelitian	Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Peaksanaan Program ATCS (Area Traffic Control System) Di Kota Bandar Lampung.
3	Variabel Penelitian	Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
4	Fenomena Penelitian	Peneliti memukan dalam website resmi ATCS Bandar Lampung yaitu <a href="http://bandarlampung.marktel.complayer">http://bandarlampung.marktel.complayer</a> . Website tersebut digunakan sebagai media online yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kondisi ruas jalan yang akan dilalui selama 24 jam, tetapi media online tersebut tidak aktif atau tidak menampilkan kondisi jalan secara baik.
5	Konsep Penelitian	Kinerja organisasi menurut Chaizi Nasucha (2004 : 107) adalah Efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui suatu usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.
6	Indikator Penelitian	Dwiyanto (dalam Pasolong, 2008:50) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu : 1) Produktivitas. 2) Kualitas Layanan. 3) Responsivitas. 4) Responsibilitas. 5) Akuntabilitas

7	Nama	Todi Maulana Meditra
8	Judul Penelitian	Evaluasi Kinerja Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
9	Variabel Penelitian	Evaluasi Kinerja.
10	Fenomena Masalah	Selama ini citra pelayanan organisasi publik lebih rendah dibanding organisasi swasta. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan kinerja sehingga kinerja organisasi dapat optimal. Hal ini perlu dilakukan karena seiring dengan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, maka organisasi publik harus mengubah citra kinerjanya agar menjadi lebih baik. Dengan demikian akan dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.
11	Konsep Penelitian	Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Harbani Pasolong, 2007 : 175)
12	Indikator Penelitian	Agus Dwiyanto (2006:50-51) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:  1) Produktivitas; 2) Kualitas Layanan; 3) Responsivitas; 4) Responsibilitas; 5) Akuntabilitas.

13	Nama	Arindra Hadi Sugianto, Siti Rochmah, Romula Adiono.
14	Judul Penelitian	Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Bidang Angkutan Umum Perkotaan. (Studi: Pada Dinas Perhubungan Kota Malang Provinsi Jawa Timur)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
15	Variabel Penelitian	Evaluasi Kinerja Pelayanan.
16	Fenomena Masalah	Melihat dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan seperti sering terjadinya kecelakaan, manusia sebagai pengemudi merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kapasitas isi kendaraan umum yang melebihi-lebihkan isi yang seharusnya, memberhentikan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan kurang terawatnya kendaraan. Serta melanggar jalur trayek yang telah ditetapkan.
17	Konsep Penelitian	Pengertian evaluasi menurut Yusuf (2000, h.3), Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
18	Indikator Penelitian	Agus Dwiyanto (2006:50-51) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: 1) Produktivitas; 2) Kualitas Layanan; 3) Responsivitas; 4) Responsibilitas; 5) Akuntabilitas.

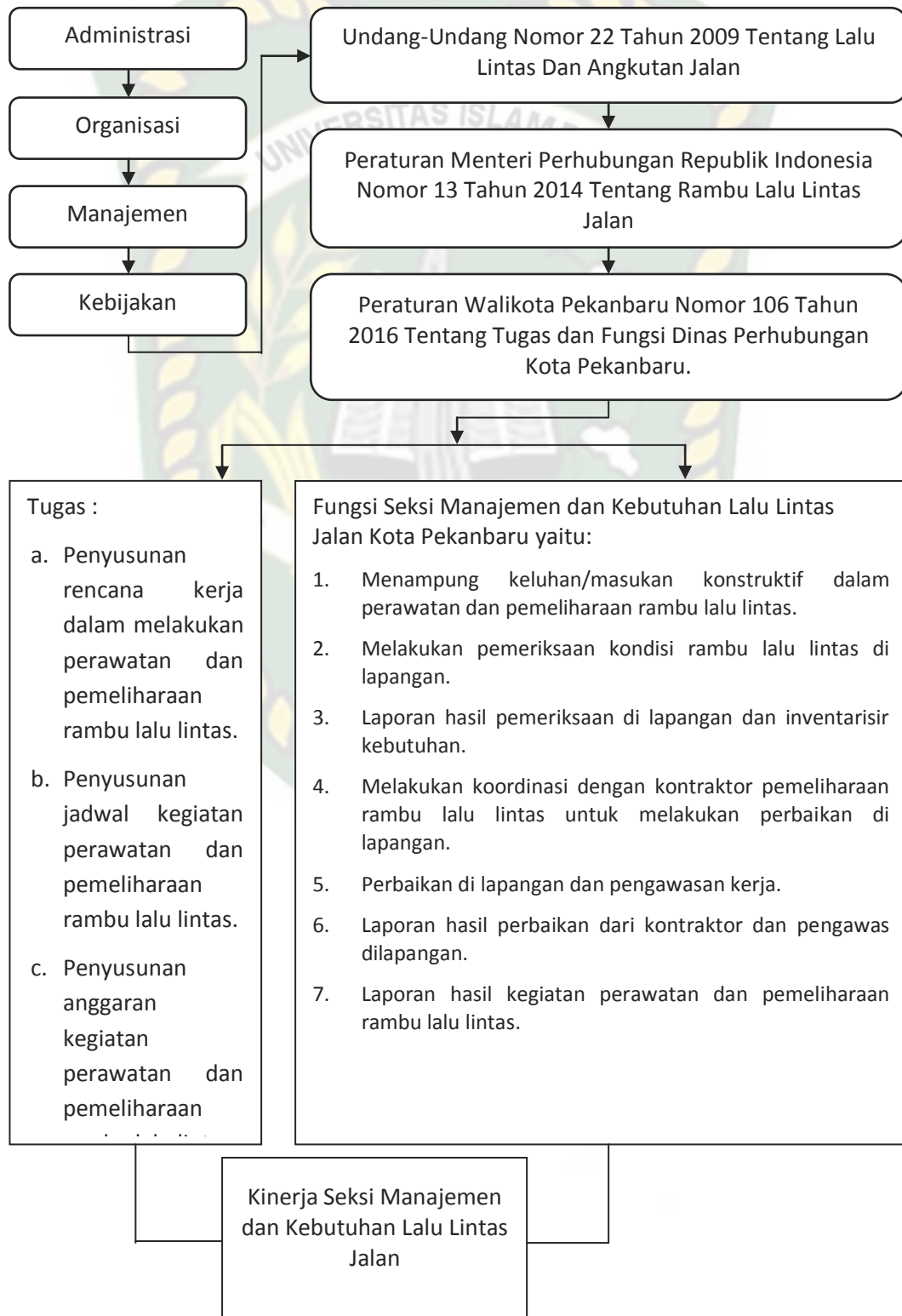
Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir diperlukan untuk

menspesifikasikan penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar II.1 di bawah ini:

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan.**





*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Tahun 2020.*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dalam mencari sumber-sumber referensi. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional dalam penelitian ini, dan konsep operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukannya organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
2. Organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah. organisasi sebagai tempat bagi sejumlah manusia untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan bersama dalam sebuah kelompok.
3. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan

yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

4. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
5. Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah di lakukan dan akan di gunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.
6. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.
7. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi.
8. Tugas:
  - a. Penyusunan rencana kerja dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas

- b. Penyusunan jadwal kegiatan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas
- c. Penyusunan anggaran kegiatan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas
9. Dan fungsi adalah suatu pendukung suatu bidang dalam melaksanakan tugasnya dan memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Fungsi ini juga digunakan sebagai indikator dalam penelitian yaitu sebagai berikut:
  - a) Menampung keluhan/masukan konstruktif dalam perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas.
  - b) Melakukan pemeriksaan kondisi rambu lalu lintas di lapangan.
  - c) Laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan inventarisir kebutuhan.
  - d) Melakukan koordinasi dengan kontraktor pemeliharaan rambu lalu lintas untuk melakukan perbaikan di lapangan.
  - e) Perbaikan di lapangan dan pengawasan kerja.
  - f) Laporan hasil perbaikan dari kontraktor dan pengawas dilapangan.
  - g) Laporan hasil kegiatan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas.

### E. Operasionalisasi Variabel

**Tabel II.1 : Operasional Variable Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Manajemen menurut Terry (dalam Hasibuan, 2001: 3). Adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan Perencanaan (Planning), Pengorganisasian	Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan.	1. Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan rencana kerja dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas.</li> <li>b. Penyusunan jadwal kegiatan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas.</li> <li>c. Penyusunan anggaran kegiatan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas.</li> </ul>



(Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengendalian (Controlling), yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.		2. Fungsi	a. Menampung keluhan / masukan konstruktif dalam perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas. b. Melakukan pemeriksaan kondisi rambu lalu lintas di lapangan. c. Laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan inventarisir kebutuhan. d. Melakukan koordinasi dengan kontraktor pemeliharaan rambu lalu lintas untuk melakukan perbaikan di lapangan. e. Perbaikan di lapangan dan pengawasan kerja. f. Laporan hasil perbaikan dari kontraktor dan pengawas di lapangan. g. Laporan hasil kegiat perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas.
---	--	-----------	---

Sumber : Olahan penulis tahun 2020

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

### **B. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kota Pekanbaru.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Alamat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di Jl. Gatot Subroto, Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155.

Alasan yang mengiring peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dimana penulis menemukan permasalahan berdasarkan hasil pra observasi yang telah dilakukan dan ditemukan beberapa permasalahan terhadap penyediaan rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru.

### **C. Key Informan dan Informan**

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan

seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Adapun *informan* dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

**Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru**

No	Jabatan	Key Informan / Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Key Informan	1
2	Kepala Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan.	Informan	1
3	Kontraktor Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Informan	1
4	Masyarakat Pengguna Jalan yang Memiliki Surat Izin Mengemudi	Informan	5
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2020*

#### **D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan**

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling jenuh, menurut Arikunto (2006:134) menjelaskan “sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus”.

Sementara itu, untuk penarikan informan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu dengan cara “*Snowball Sampling*” dimana menurut Sugiyono, (2016:85). *Snowball Sampling* adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-

temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Snowball Sampling* untuk mencari informasi yang lebih akurat.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian. Dalam data primer ini *key Informan* penelitian yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sedangkan sebagai *Informan* adalah Kepala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, Kontraktor Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Masyarakat Pengguna Jalan yang Memiliki Surat Izin Mengemudi.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**



Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2016 : 203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan yang digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung melalui wawancara survey analisis jabatan. Dalam dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi perhatian penulis untuk dilakukan observasi adalah:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Kondisi Rambu Lalu Lintas yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilapangan.
2. Proses perbaikan rambu lalu lintas yang dilaksanakan dilapangan.
3. Pengamatan kondisi dari setiap rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan adapun hal-hal yang di wawancara kepada informan adalah:

- 1) Terkait dengan penyusunan rencana kerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- 2) Penyusunan Jadwal Kerja.
- 3) Penyusunan dan ketersediaan anggaran yang di alokasikan untuk melaksanakan proses perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru.’
- 4) Mewawancarai terkait hal pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan rambu lalu lintas.
- 5) Menanyakan tentang pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap rambu lalu lintas.
- 6) Menanyakan perihal tentang ketersediaan media untuk menampung saran dan kritik dari masyarakat selaku pengguna jalan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

**G. Teknik Analisa Data**

Menurut Sugiyono (2014:428) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data itu dikumpulkan, maka kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data, analisis yang digunakan oleh

penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah.

Menurut Sugiyono (2014:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut, a”nalisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mantabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan.

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Penelitian Tahun 2020																											
		Januari				Februari				Meret				April				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal																												





Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- b. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- d. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. (<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, Dikutip 10 Oktober 2019)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. (<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, Dikutip 10 Oktober 2019)

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, hampir 25 persennya dalam keadaan rusak, dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa pertambahan jumlah kendaraan juga akan sangat pesat. Dengan demikian jika tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika maka kemacetan dan ketidak nyamanan dalam berkendara di Kota Pekanbaru akan menjadi sesuatu hal yang harus dihadapi oleh masyarakat khususnya pengguna

jalan raya. Hal ini sudah terlihat saat kita mulai memasuki kecamatan Tampan kota Pekanbaru khusus nya di simpang Garuda Sakti Panam, dengan penambahan penduduk yang pesat dan juga di iringi petambahan jumlah kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, daerah tersebut selalu mengalami kemacetan hampir di sepanjang hari di mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari hal ini di perparah dengan tidak berfungsinya Rambu lalu lintas (*traffic light*) yang ada di persimpangan tersebut. Dan juga dengan bebasnya kendaraan dengan ukuran besar yang masuk ke jalan HR. Soebrantas yang memang di larang untuk kendaraan besar bertonase berat. Selain dari permasalahan tersebut di tambah lagi dengan terpusatnya perkembangan kota yang di utamakan disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan serta kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru. (<http://pekanbaru.go.id/p/statistik/panjang-jalan-dan-angkutan-darat>, Dikutip 10 Oktober 2019)

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.  
(<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, 10 Oktober 2019)

## **2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjaga.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki,

Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

**Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
<b>Jumlah</b>		<b>458.059</b>	<b>446.020</b>	<b>887.438</b>

*Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018*

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai



Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

( BPS Kota Pekanbaru 2018)

**Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
<b>Jumlah</b>		<b>190.551</b>	<b>99.923</b>	<b>67.201</b>	<b>68.014</b>	<b>35.511</b>	<b>117.952</b>	<b>420.250</b>

*Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018*

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang. (BPS Kota Pekanbaru Tahun 2018)

### 3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia.

Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri

dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir. Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Di Kota Pekanbaru**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1	Kecamatan Tampan	a. Simpang baru b. Sidomulyo barat	c. Tuah karya d. Delima
2	Kecamatan Payung Sekaki	a. Labuh Baru Timur b. Tampan/	c. Air hitam d. Labuh baru barat
3	Kecamatan Bukit Raya	a. Simpang tiga b. Tangkerang Selatan	c. Tangkerang Utara d. Tangkerang Labuai
1	2	3	
4	Kecamatan Marpoyan Damai	a. Tangkerang Tengah b. Tangkerang Barat	c. Maharatu d. Sidomulyo Timur e. Wonorejo
5	Kecamatan Tenayan Raya	a. Kulim b. Tangkerang Timur	c. Rejosari d. Sail
6	Kecamatan Sail	a. Cita Raja b. Suka Maju	c. Suka Mulia

7	Kecamatan Lima Puluh	a. Rintis b. Sekip	c. Tanjung Rhu d. Pesisir
8	Kecamatan Pekanbaru Kota	a. Simpang empat b. Sumahilang c. Tanah Datar	d. Kota Baru e. Suka Ramai f. Kota Tinggi
9	Kecamatan Senapelan	a. Padang Bulan b. Padang Terubuk c. Sago	d. Kampung dalam e. Kampung Bandar f. Kampung Baru
10	Kecamatan Sukajadi	a. Jatirejo b. Kampung tengah c. Kampung melayu d. Kendungsari	e. Harjosari f. Sukajadi g. Pulau koran
11	Kecamatan Rumbai	a. Limbunsari b. Muara fajar c. Rumbai bukit	d. Palas e. Sri meranti
12	Kecamatan Rumbai Pesisir	a. Meranti Pandek b. Limbungan c. Lembah sari	d. Lembah damai e. Limbungan baru f. Tebing tinggi okura

**Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2018**

Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru memiliki memiliki 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir, dan setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan sesuai yang tertera pada tabel di atas.

### **B. Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.**

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 sesuai dengan surat Menteri Perhubungan sebagai Intansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut, maupun udara dalam rangka memajukan perekonomian di



Indonesia khususnya kota Pekanbaru sebagai mana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dulunya bernama Dinas LLAJ ( Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ), kemudian adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar Otonomi Daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 yang membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 oleh UU.32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.8 Tahun 2008 dan Perwako No.8 Tahun 2009 Setelah pergantian peraturan-peraturan tersebut maka Dinas Perhubungan kota Pekanbaru kembali di ganti menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kota Pekanbaru atau Dishubkominfo kota Pekanbaru dan saat ini kembali di rubah menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan perangkat organisasi aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terdiri dari :

Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

1. Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari :

1.1 Sekretaris; yang membawahi :

1.5.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.5.1.2 Sub Bagian Keuangan

1.2 Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, yang membawahi :

1.5.2.1 Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu lintas Jalan dan Perairan

1.5.2.2 Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu lintas Jalan dan Perairan

1.5.2.3 Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan

1.3 Bidang Angkutan, yang membawahi :

1.5.3.1 Seksi Angkutan Orang

1.5.3.2 Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan

1.5.3.3 Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan

1.4 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, yang membawahi :

1.5.4.1 Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan

1.5.4.2 Seksi Penerangan Jalan

1.5.4.3 Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan

1.5 UPT yang terdiri dari :

1.5.5.1 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

1.5.5.2 UPT Parkir

1.5.5.3 UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru

1.5.5.4 UPT Pelabuhan Pekanbaru

2.1.1 Tugas dan fungsi

Kepala dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan dan tugas pembantuanlainnya.

Kepala dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidangperhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Pengoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan perhubungan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat,bidang angkutan,manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasana.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan. Perencanaan, penyusunan, Perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- b. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- c. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- d. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- e. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Sekretariat terdiri dari :
- h. Sub bagian umum.
- i. Sub bagian keuangan.
- j. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

**Tabel IV.4. Tingkat pendidikan, golongan, dan jabatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor (S-3)	0
2	Pasca Sarjana (S-2)	9
3	Sarjana (S-1)	35
4	Diploma (D-3)	3



5	Diploma (D-2)	1
6	S L T A	41
7	S L T P	2
8	S D	-
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020*

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	52
3	II	34
4	I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>91</b>

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020*

No	Jabatan	Jumlah
1	Esselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Esselon III A (Sekretaris)	1
3	Esselon III B (Kepala Bidang)	3
4	Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka UPT)	11
5	Esselon IV B (Kassubag TU UPT)	4
6	Staf (Termasuk CPNS)	71
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020*

### C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.

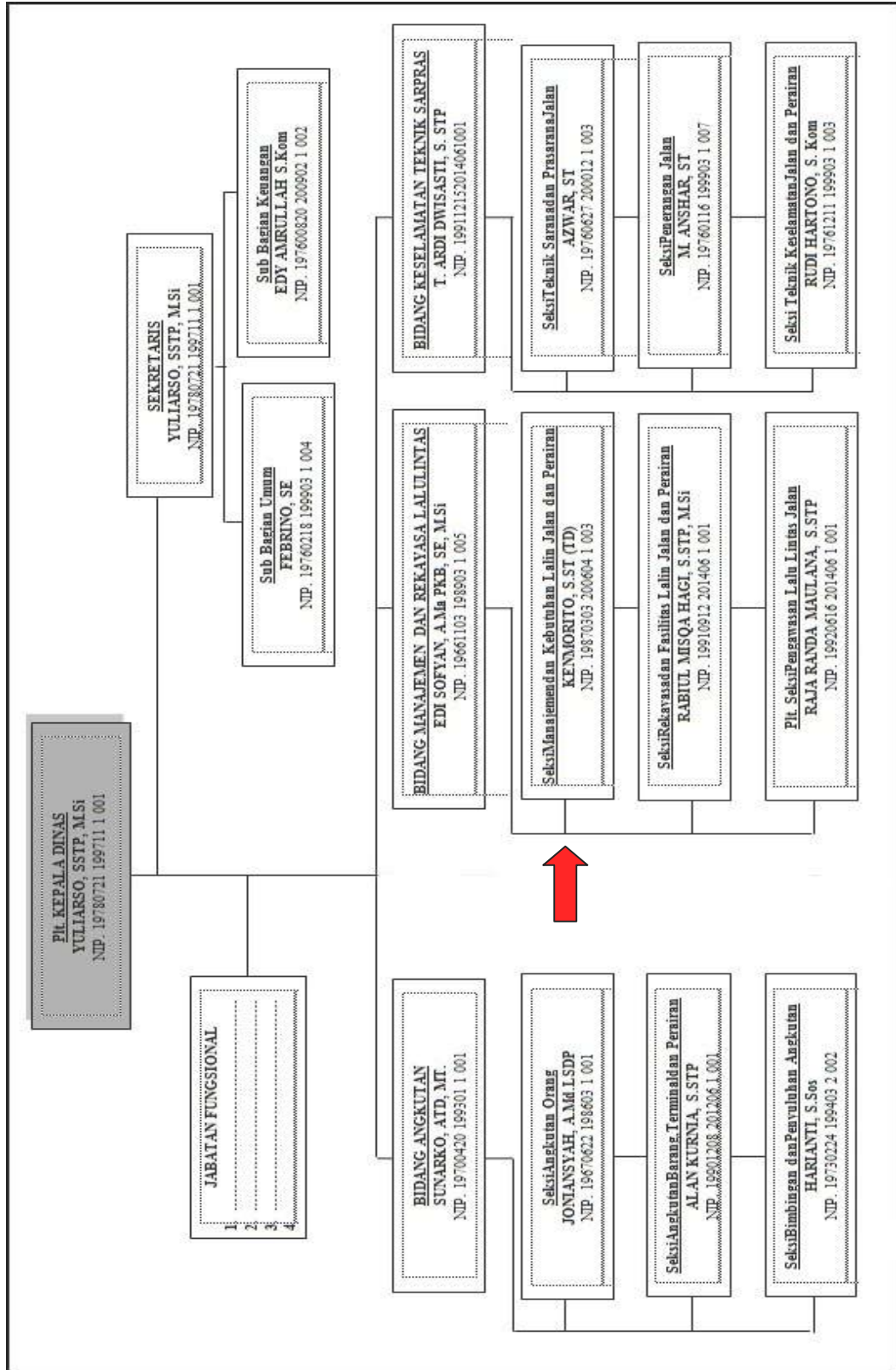
Dalam sebuah instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi bisnis, yang disebut sebuah organisasi haruslah ada sebuah susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat di sebut sebagai struktur organisasi. Yang mana bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagai organisasi /lembaga pemerintah negara yang memiliki struktur organisasi yang di maksud.

Struktur organisasi akan tampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang dimaksud dengan bagan organisasi yaitu satu gambaran

dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran, aliran organisasi yang syah, dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut, jadi struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan negara. karena pentingnya pendelegasian wewenang yang jelas merupakan konsekuensi dan keterbatasan seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Sementara pendelegasian wewenang umumnya tercermin pada struktur organisasi pemerintah negara tersebut. Dan selanjutnya struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagan IV.4 dibawah berikut:

**Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.**



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020

BAB V

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

**Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru.**

No	Nama	Posisi / Status	Keterangan
1	Edi Sofyan, SE., M.Si	Kabid Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.	Pegawai Dishub
2	Kenmorito, S.ST	Kasi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas.	Pegawai Dishub
3	Suharda Apriawan, ST	Kepala TIM Lapangan	Kontraktor
4	Defri Wihandi	Pengguna Jalan	-
5	Zulhadi	Pengguna Jalan	-
6	Alfan Hidayat	Pengguna Jalan	-
7	R. Siagian	Pengguna Jalan	-
8	Zulkarim Ritonga	Pengguna Jalan	-

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2020*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 8 (Delapan) orang, yang berasal dari Dinas Perhubungan, Kontraktor Pemeliharaan Rambu Lalu



Lintas Jalan, dan juga Masyarakat selaku pengguna jalan, dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, dan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

**B. Evaluasi Kinerja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru.**

Menurut Arikunto, dkk (2010;56), Evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan, mevaluasi merupakan sebuah proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan. Ini untuk menjamin bahwa apa yang kita jalankan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, evaluasi tidak terbatas pada aktivitas teknis, melainkan juga non-teknis, ia digunakan dalam berbagai macam bidang, terutama dalam lingkup perusahaan, proyek ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan sistem.

Secara umum, evaluasi diartikan sebagai proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan yang seharusnya dicapai.

Berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini, bahwa melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya melalui Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan tujuannya

adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan selama ini telah memberikan perubahan terhadap target yang di tuju, dimana salah satunya adalah tugas dan fungsi mereka dalam mengurus rambu lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui masing-masing pembahasan yang akan penulis teliti tersebut, maka penulis akan menyajikannya pada masing-masing pembahasan berikut ini:

### **1. Tugas**

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang atau sebuah organisasi atau sekelompok orang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu pekerjaan yg wajib dikerjakan atau yg ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.

Tugas secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan pembahasa diatas, maka penulis akan menyajikan pembahasan tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas perhubungan melalui Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, dan hasil penelitian dilapangan yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Penyusunan Rencana Kerja Dalam Melakukan Perawatan Dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas.**

Tujuan dari penyusunan rencana kerja ini tentunya untuk menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan khususnya Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan penilaian atau evaluasi apakah hasil yang di dapat telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari penyusunan rencana kerja yang ada di Dinas Perhubungan khususnya Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan atau tidak, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan yang berhasil ditemui, dimana informan tersebut adalah Bapak Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si yang menjabat selaku Kepala Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Pekanbaru, dan adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan penyusunan rencana kerja di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

“Ada, itu sudah menjadi kewajiban dalam menjalankan instansi Pemerintah, bagaimana kita bekerja kalau tidak ada target, karna dalam penyusunan rencana kerja inilah nantinya akan di tentukan apa saja yang akan kita capai, dan evaluasi yang dilakukan tentunya akan berstandar dari rencana kerja yang di tetapkan, dan program-program yang kita jalankan saat ini semua berasal dari Rencana Kerja yang telah di susun di akhir tahun, di laksanakan di awal tahun selama priode 1 tahun kerja” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30

Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan penulis diatas, dijelaskan bahwa penyusunan rencana kerja memang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, khususnya tugas dan fungsi dari Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, dan untuk mengetahui rencana kerja yang di susun oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) pada jalan-jalan Kota Pekanbaru.
2. Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan P arkir, dan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan.
3. Tercapainya standar keselamatan bagi pengguna jalan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan diatas, penulis dapat memberikan analisis terkait hasil tersebut yaitu tentang pelaksanaan rencana kerja tersebut dilapangan, dimana apabila memang pelaksanaan penyusunan rencana kerja telah dilakukan, fakta yang ditemukan dilapangan berdasarkan hasil observasi menunjukkan belum terlaksananya proses kerja yang khususnya menyangkut tentang pemeliharaan dan perawatan terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru.

**b. Penyusunan Jadwal Kegiatan Perawatan Dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas.**



Secara umum definisi atau pengertian jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja yang ditulis dalam bentuk daftar atau tabel kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terinci. Proses dari pembuatannya disebut dengan penjadwalan yang merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan sebagai rencana pengaturan urutan kerja serta pengalokasin waktu pelaksanaannya. Secara umum, fungsi dari penetapan jadwal kerja program adalah sebagai berikut:

- 1) Melatih kedisiplinan
- 2) Melatih tanggung jawab
- 3) Tidak membuang-buang waktu
- 4) Rutinitas lebih teratur
- 5) Menciptakan target dalam hidup
- 6) Membantu manajemen waktu
- 7) Meningkatkan produktivitas
- 8) Menghilangkan stress
- 9) Memberikan manfaat kesehatan
- 10) Mendorong kreatifitas
- 11) Mengingatn hal yang terlewatkan

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah di dalam pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan khususnya Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana metodenya yaitu dengan melakukan wawancara bersama informan yang berasal dari Dinas Perhubungan itu sendiri, dimana beliau adalah Bapak Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si yang menjabat selaku Kepala Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kota

Pekanbaru, dan adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan penyusunan

Jadwal kerja di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Khusus untuk pelaksanaan tugas dibidang pengadaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas jalan, itu sifatnya kondisional, apabila memang ada kebutuhan yang mendesak, maka kita akan melakukannya disaat itu, contohnya rambu lalu lintas rusak karena tertabrak mobil, maka kita akan melakukan penyusunan rencana kerja untuk menggantinya dan kalau dapat perintah tugas dari Kepala Dinas, maka kita akan terjun langsung kelapangan, dengan demikian, maka secara pasti saya katakana bahwa tidak ada penetapan jadwal khusus kapan harus melakukan penggantian rambu lalu lintas jalan tersebut” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Melanjutkan proses wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga menanyakan perihal tentang jadwal perawatan dan jadwal pengadaan rambu lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru, apakah hal tersebut menjadi salah satu program dari Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Saat ini kita belum ada program pengadaan rambu lalu lintas baru dengan skala besar, kalau perawatan, itu pastinya ada, prosesnya seperti pembersihan terhadap rambu lalu lintas yang sudah kotor dan perlu pengecatan ulang, tetapi untuk jadwal pengadaan rambu lalu lintas baru, kita belum ada rencana tersebut dalam waktu dekat ini” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru).

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan wawancara diatas bahwa pelaksanaan tugas dibidang kebutuhan lalu lintas jalan seperti pengadaa rambu lalu lintas tidak menjadi prioritas dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan dikatakan pula bahwa pengadaan rambu lalu lintas jalan yang baru tidak masuk dalam skala prioritas kerja program mereka dalam waktu dekat ini, sementara fakta dilapangan adalah bahwa kondisi Rambu lalu lintas yang ada saat ini sudah

banyak yang rusak dan juga sudah termakan usia sehingga membutuhkan penggantian dan perawatan agar pengguna jalan dapat melihat tanda-tanda pada setiap rambu lalu lintas yang terdapat di sisi jalan raya.

Dari hasil observasi dan analisis yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih menganggap ketersediaan rambu lalu lintas bukanlah sesuatu hal yang harus diprioritaskan, padahal faktanya adalah, ketersediaan rambu lalu lintas menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi di jalan raya, dan juga untuk mengurangi angka kecelakaan, dengan dilengkapinya fasilitas rambu lalu lintas, maka masyarakat pengguna jalan raya akan mengetahui titik-titik mana saja yang diberlakukan larangan dan akan menghindari lokasi tersebut untuk keselamatan mereka, contoh saja permasalahan terkait dengan dilarang untuk menyebrang atau dilarang untuk berjalan di area tersebut, maka dengan adanya tanda tersebut, akan menghindarkan masyarakat pengguna jalan terhadap resiko bahaya yang akan mereka hadapi.

#### **c. Penyusunan Anggaran Kegiatan Perawatan Dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas.**

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perangkat Daerah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian, Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran agar pembelanjaan

yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Tanpa anggaran, tentunya sebuah organisasi baik Pemerintah maupun swasta tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

Peranan anggaran pada suatu Organisasi ataupun Perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program, dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa organisasi kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah instansi seperti Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menyusun penetapan anggaran untuk program kerjanya atau tidak, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan yang akan menjawab pembahasan tentang penganggaran tersebut.

Untuk menjalankan program kerjanya, tentu saja Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru membutuhkan anggaran dalam pelaksanaan dilapangan, dan dalam hal ini, penulis telah mewawancarai informan penulis yaitu Bapak Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si yang menjabat selaku Kepala Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Pekanbaru, dan adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



“Dishub Kota Pekanbaru memiliki jumlah anggaran untuk tahun 2019 itu sekitar 208 Miliar, jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan, dan secara khusus untuk program dibidang pengadaan rambu lalu lintas itu dialokasikan dana sebesar 200 juta, dan pemasangan lampu penerangan untuk jalan-jalan di Kota Pekanbaru itu sekitar 3.5 Milliar, secara gambaran, itu adalah informasi yang dapat saya berikan terkait dengan anggaran yang tersedia untuk Dishub Kota” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan pada hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki jumlah anggaran yang cukup besar yaitu Rp 208.000.000.000,- secara keseluruhan, dan dana tersebut akan di bagi-bagi lagi kemasing-masing bidang pelaksana tugas, dan yang menjadi focus penelitian penulis yaitu perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan hanya mengalokasikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- untuk menjalankan seluruh program dibidang rambu lalu lintas selama setahun, dengan demikian, tentu saja jumlah tersebut terbilang sangat kecil apabila dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru itu sendiri, dan sebagai perbandingan, sebagaimana dikatakan diatas, untuk pengadaan lampu penerangan jalan saja, Dinas Perhubungan memberikan alokasi dana sebesar Rp 3.500.000.000,- hal ini sangat berbanding terbalik dengan penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru, padahal fakta dilapangan adalah kondisi-kondisi rambu tersebut sudah banyak yang memerlukan perbaikan dan pergantian yang lama dengan yang baru.

## **2. Fungsi**

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal

adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum. (Admosudirjo, 2001:4)

Fungsi ialah perwujudan tugas di bidang tertentu yang dilakukan dalam rangka menjangkau sebuah tujuan. Definisi lain melafalkan bahwa fungsi ialah sekelompok kegiatan yang termasuk pada jenis yang sama menurut sifat atau pelaksanaannya. Suatu organisasi mengadakan fungsi-fungsi dalam rangka mengemban sebuah tugas pokok.

Untuk mengetahui apa saja fungsi dari Dinas Perhubungan khususnya Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya, maka penulis akan menyajikan hasil analisisnya pada masing-masing pembahasan berikut ini:

**a. Menampung Keluhan/Masukan Konstruktif Dalam Perawatan Dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas.**

Era reformasi menghadirkan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru di mana kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Komitmen politik tersebut diwujudkan dalam bentuk pengesahan berbagai undang-undang untuk menjamin hak-hak politik masyarakat, yaitu: kebebasan berbicara,

berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa rasa takut. Kehadiran berbagai undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai tonggak akan hadirnya era demokrasi di Indonesia. Konsekuensi dari itu semua kedualatan dipegang oleh rakyat sehingga suara rakyat harus didengar dan diperhatikan oleh pemerintah yang diberi otoritas oleh rakyat melalui pemilihan presiden, gubernur dan bupati secara langsung.

Dengan demikian, berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti pada penelitian ini, hal yang ingin penulis ketahui adalah pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui bagaimana proses pengaduan yang disediakan oleh pihak Dinas Perhubungan kepada masyarakat, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk wawancara dan analisis, dimana informan yang penulis wawancarai terkait dengan permasalahan diatas adalah Bapak Kenmorito, ST yang saat ini menjabat sebagai Kasi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. jawaban yang beliau berikan adalah:

“Kita sediakan, untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap kondisi kebutuhan jalan di Kota Pekanbaru, seperti *Traffic Light* yang mati/rusak, atau rambu lalu lintas lainnya yang mengalami kerusakan, bisa melakukan pelaporan secara langsung melalui nomor yang kita telah sosialisasikan di jalan-jalan Kota Pekanbaru, khususnya di setiap persimpangan yang ada *Traffic Light* (lampu lalu lintas)”, untuk nomor center yang bisa dihubungi itu adalah 0811-769-466, atau untuk alternatif lain bisa mendatangi kantor kita langsung (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Kenmorito, ST Kepala Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru)

Melanjutkan pembahasan yang telah disajikan diatas, penulis juga menanyakan kepada informan yang berasal dari Dinas Perhubungan terkait dengan bagaimana

proses penanganan yang dilakukan apabila ada keluhan masyarakat, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Tentunya kita sangat terbantu dengan adanya kontribusi yang masyarakat berikan dengan melapor apabila menemukan kerusakan terhadap fasilitas jalan, dan apabila ada laporan, maka tim akan menuju ke lokasi untuk melakukan perbaikan, apalagi laporan yang sifatnya mendesak seperti Traffic Light mati atau rusak karna tertabrak mobil besar contohnya, hal itu sangat mendesak dan tim akan langsung di kirim kelapangan (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Kenmorito, ST Kepala Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru)

Berbeda dengan tanggapan yang diberikan oleh informan penulis diatas, hasil wawancara penulis dengan masyarakat selaku pengguna jalan memiliki jawaban yang relatif berbeda, dimana salah satunya adalah wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Defri Wihandi, yang penulis wawancarai di Jalan Durian, Kecamatan Sukajadi, dimana beliau memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya kira belum maksimal ya pihak Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya, khususnya saat ini dimana banyak jalan dipakai untuk proyek penggalian, disana sangat minim rambu-rambu, kalau memang mendesak silahkan jalannya ditutup, agar tidak menjadi penyebab kemacetan, khususnya saat ini kita tidak dalam kondisi yang baik karena wabah Corona, sangat riskan apabila harus bermacet-macetan disaat pulang kerja, dan jika dilaporkanpun, saya kira hasilnya akan sama saja, tidak akan banyak perubahan, dan saya tidak tau harus melapor kemana, karna memang tidak tau nomor yang harus dihubungi. (Wawancara, 13 Maret 2020, Pukul 09.30 Wib, Bapak Defri Wihandi, Pengguna Jalan Di Kota Pekanbaru)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, informan lainnya yang merupakan masyarakat pengguna jalan di Kota Pekanbaru memberikan tanggapannya terkait dengan sistem pelaporan yang disediakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana Bapak Zulhandi salah satu informan penulis memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Saya tidak tau, tidak punya nomor mereka, dan saya kira memang Dinas Perhubungan harus melakukan perbaikan terhadap beberapa kondisi rambu-rambu jalan di Kota Pekanbaru ini, banyak yang sudah jelek, bahkan banyak



yang sudah tidak terlihat lagi karna posisinya tidak sesuai dengan jarak pandang pengendara. (Wawancara, 13 Maret 2020, Pukul 10.00 Wib, Bapak Zulhandi, Pengguna Jalan Di Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dan ditambah dengan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan sistem pelaporan terkait dengan keluhan atau masukan-masukan yang seharusnya dapat diberikan masyarakat belum berjalan dengan baik, dimana masyarakat masih kebingungan akan melakukan pelaporan kemana, karna rata-rata masyarakat yang penulis wawancara mengaku tidak mengetahui nomor yang dapat dihubungi apabila ingin melakukan pelaporan atau menyampaikan keluhan terhadap kondisi rambu lalu lintas yang mereka temui, dan penulis menemukan kondisi rambu lalu lintas dijalan-jalan Kota Pekanbaru memang membutuhkan perbaikan dan juga pergantian di beberapa ruas jalan, hal ini tentunya penulis sejalan atau sependapat dengan pengguna jalan yang memberikan tanggapannya.

#### **b. Melakukan Pemeriksaan Kondisi Rambu Lalu Lintas Di Lapangan.**

Dalam menjalankan tugas dibidang pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas jalan Kota Pekanbaru, salah satu hal yang paling penting adalah pengawasan atau pemantauan yang dilakukan dilapangan, hal ini berfungsi untuk memastikan bagaimana kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antarakondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Menurut Mulyadi (2002 ; 40) definisi pemeriksaan adalah Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengvaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan sedangkan pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Suatu pengawasan akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila keseluruhan tindak lanjut itu di laksanakan, maka keseluruhan pekerjaan tersebut merupakan pengendalian. Akan tetapi bilamana tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan.

Dengan pengertian yang telah disajika diatas, berkaitan dengan pembahasan penelitian yang sedang penulis kerjakan, maka untuk mengetahui apakah dalam menjalankan tugas Pemeliharaan dan Perawatan kondisi rambu lalu lintas di jalan Kota Pekanbaru Dinas Perhubungan telah melaksanakan sistem pemeriksaan secara langsung terkait dengan kondisi rambu tersebut, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan yang berasal dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si yang menjabat selaku Kepala Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Pekanbaru, dan adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan pelaksanaan pemantauan atau pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Pastinya ada dilakukan, salah satu bentuknya dengan kegiatan patroli, anggota kita melakukan pemantauan dilapangan terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi, baik itu rambu lalu lintas ataupun sarana dan prasarana

fasilitas lainnya, dari hasil pemantauan inilah nantinya kita bisa melakukan kebijakan apa saja yang akan dikerjakan untuk perbaikan kedepannya.” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan diatas, maka penulis dapat memberikan analisis terkait dengan kondisi yang terjadi dilapangan, jika memang petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan perhatian khusus terhadap kondisi rambu lalu lintas dan fasilitas jalan lainnya, maka seharusnya tidak ada lagi terdapat fasilitas rambu lalu lintas yang rusak atau bahkan ketersediaan rambu lalu lintas seharusnya sudah sepenuhnya tersedia.

Tetapi pada faktanya dilapangan adalah, masih banyak rambu lalulintas jalan yang belum mendapatkan penanganan baik itu secara perbaikan, pengadaan, atau bahkan pemeliharaan, hal ini tentu saja berdampak terhadap pengguna jalan yang akan mengalami kesulitan untuk mengetahui aturan yang terdapat di jalan-jalan Kota Pekanbaru, khususnya daerah yang dianggap rawan kecelakaan.

### **c. Laporan Hasil Pemeriksaan Di Lapangan Dan Inventarisir Kebutuhan.**

Dalam melaksanakan kegiatan, salah satu hal yang wajib dilakukan oleh masing-masing tim kerja adalah melakukan sistem pelaporan sebagai salah satu tanggungjawab dalam bekerja, hal ini juga berlaku bagi setiap tim yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, di dalam menjalankan tugasnya, masing-masing tim diwajibkan memberikan laporan terkait dengan aktivitas tugas mereka dilapangan, dan untuk mengetahui secara pasti bagaimana proses tersebut berjalan, maka penulis akan menyajikan wawancara penulis dengan Bapak Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si yang menjabat selaku Kepala Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Pekanbaru, dan adapun tanggapan yang beliau

berikan terkait dengan pelaksanaan pelaporan kerja dan kegiatan pelaksanaan tugas dilapangan adalah sebagai berikut:

“Setiap pelaksanaan program yang diberikan oleh pimpinan, masing-masing bidang tentunya harus memiliki pertanggungjawaban kegiatan melalui laporan-laporan yang di susun dalam bentuk jurnal, makalah, ataupun laporan biasa yang sifatnya memuat seluruh aktivitas kegiatan dan hasil program dilapangan, hal ini juga berlaku bagi tim yang saya bawahi, salah satunya Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, dimana setiap kegiatan yang sifatnya tugas, harus memberikan laporan hasil kerja kepada saya sebagai bahan evaluasi agar saya bisa mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Dinas” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Berkaitan dengan pertanyaan diatas, penulis juga melakukan wawancara lanjutan yang menanyakan tentang bagaimana proses laporan yang dilakukan terkait dengan kebutuhan atau inventaris kebutuhan kerja dilapangan, dan jawaban yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

“Sama hal nya seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan serta dijadikan sebagai aset Dinas yang dibawa kelapangan, semua harus punya data dan rinciannya, hal ini bertujuan, dimana ketika nanti program selesai, kita akan dengan mudah melakukan pengecekan fasilitas apa yang hilang atau rusak, hal ini masuk ke dalam laporan kerja juga” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat memberikan analisis bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kerja dari Bidang Manajemen lalu lintas jalan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, harusnya memberikan laporan-laporan kerja baik itu penggunaan inventaris kantor maupun hasil kerja dilapangan, segala sesuatunya harus dilaporkan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.



**d. Melakukan Koordinasi Dengan Kontraktor Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Untuk Melakukan Perbaikan Di Lapangan Pengawasan Kerja.**

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to regulate.

Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mewawancari pihak-pihak yang dianggap saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah kerjasama yang terjalin antara Dinas

Perhubungan dengan pihak Kontraktor yang melakukan pekerjaan dilapangan, dan adapun wawancara penulis dengan kedua belah pihak diantaranya adalah:

“Benar, kita bekerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan dilapangan, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia, kita harus melakukan itu, nantinya tugas lapangan dikerjakan oleh kontraktor yang terpilih, dimana tugas dari kontraktor adalah untuk bagian eksekusi dilapangan, pemasangan dan penyediaan sarana dan prasarana tersebut, jadi dalam hal pembuatan, pengecatan, sistem pemasangan di jalan-jalan, itu semua dilakukan oleh kontraktor dengan pengawasan kita pastinya” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Melanjutkan pertanyaan diatas, penulis juga memberikan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan perbaikan atau perawatan setelah proyek pengadaan dilakukan, apakah masih tanggungjawab dari pihak Kontraktor atau sepenuhnya tanggungjawab dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah sebagai berikut:

“Tetap tanggungjawab kita, karna mereka hanya sebagai pelaksana diawal saja, ketika pekerjaan yang diberikan selesai dilaksanakan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka tanggungjawab mereka selesai, dan dikemudian hari apabila ada pekerjaan baru lagi, maka kita akan melakukan kontrak baru juga dengan mereka” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Berkaitan dengan pembahasan tersebut, untuk mendapatkan jawaban yang paling relevan, maka penulis juga telah melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan kontraktor di Kota Pekanbaru yang memang secara histori pernah melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana informan penulis tersebut adalah Bapak Suharda Apriawan, ST selaku kepala tim lapangan perusahaan kontraktor yang bekerja dalam proyek pengadaan pengadaan

rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru, dan tanggapan yang beliau berikan terkait dengan koordinasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan dengan Kontraktor adalah sebagai berikut:

“Tugas kita hanya dilapangan pada saat itu, kita yang menyediakan material, pengelasan, pengecatan, dan tanda apa saja yang mau di adakan, semua itu disepakati dalam rapat yang diadakan di kantor Dinas Perhubungan, dan dalam kontrak kerja, kita hanya melakukan penyediaan alat dan pemasangan alat penanda (fasilitas rambu lalu lintas), setelah semua alat terpasang, maka tanggungjawab kita selesai” (Wawancara, 16 Maret 2020, Pukul 10.00 Wib, Bapak Suharda Apriawan, ST)

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya melakukan koordinasi dengan pihak Kontraktor (swasta) dalam hal pemasangan atau pengadaan alat penanda atau fasilitas lainnya, diluar itu, untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan secara keseluruhan hal tersebut menjadi tanggungjawab dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

**e. Laporan Hasil Perbaikan Dari Kontraktor Dan Pengawas Di Lapangan.**

Berkaitan dengan pembahasan tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, setelah pengawasan dilakukan tentunya akan ada proses evaluasi dan analisa yang dilakukan oleh pimpinan dimana dalam hal ini adalah Kepala Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, untuk melakukan proses-proses tersebut, pimpinan tentunya harus menerima laporan terkait kondisi yang terjadi dilapangan, dan untuk mengetahui apakah selama ini Kepala Bidang melakukan evaluasi dari hasil laporan yang diberikan oleh anggota yang bertugas dilapangan atau justru sebaliknya, maka penulis akan menyajikan tanggapan beliau yang berhasil penulis wawancarai sebagai berikut ini:

“Tentu, laporan-laporan tim dilapangan menjadi sesuatu yang wajib diberikan kepada saya, dan ini juga sebagai bahan saya untuk melakukan evaluasi dan melapor ke Kepala Dinas, dengan laporan-laporan dilapangan maka saya akan menentukan kebijakan berikutnya, dan saya sendiri juga sering kali melakukan kontrol langsung kelapangan terkait dengan proses pembangunan tentang fasilitas ataupun pengendalian lalu lintas jalan” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatas, dimana pelaksanaan pelaporan menjadi sesuatu hal yang wajib diberikan oleh tim yang ditugaskan dilapangan, salah satunya adalah Kepala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, dan juga pihak ketegas atau swasta yang diberikan tugas, dengan demikian maka pembahasan pada sub indikator ini mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pelaporan telah dilaksanakan oleh masing-masing tim yang bekerja dibawah kendali Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

#### **f. Laporan Hasil Kegiatan Perawatan Dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas.**

Selain dari pelaksanaan laporan terkait dengan aktivitas yang dilakukan tim dilapangan, penulis juga menanyakan tentang apakah dilaksanakan tugas dengan memberikan laporan terkait dengan kegiatan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas jalan dilapangan, laporan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana tim dilapangan menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Bidang selaku pimpinan yang mengatur Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Sama hal nya dengan pelaksanaan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor, tim yang diberikan tugas melakukan perbaikan dan pemeliharaan juga wajib menyusun laporan terkait dengan temuan-temuan dilapangan dan



juga tugas yang telah mereka selesaikan, dengan laporan inilah kita bisa melakukan evaluasi terhadap pencapaian kerja dan pengeluaran anggaran terhadap proses dari program tersebut” (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Edi Sofian, A.Ma PKB., SE., M.Si Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, selain dari Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, penulis juga melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan selaku pelaksana tugas dilapangan, terkait dengan pertanyaan penulis yang membahas tentang pelaksanaan pelaporan terhadap tugas dilapangan, jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Wajib, setiap tugas yang saya jalankan berdasarkan program-program dan perintah atasan, itu wajib disusun laporannya, baik itu dari segi waktu pengerjaan, anggaran, hal yang tak terduga dilapangan, dan juga kendala yang dihadapi, secara keseluruhan harus dimuat dalam laporan kerja dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di evaluasi. (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Kenmorito, ST Kepala Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing tim di dalam Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas jalan harus bertanggungjawab kepada atasannya, dimana laporan-laporan yang harus dipertanggungjawabkan adalah pelaksanaan kegiatan kerja, penganggaran, kebutuhan material, kendala dilapangan, dan hal lain yang tak terduga, pelaporan ini bertujuan untuk memberikan bahan evaluasi kepada pimpinan agar dapat menentukan kebijakan untuk pelaksanaan program dikemudian harinya.

### **C. Faktor Kendala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Di**

## **Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru.**

Dalam menjalankan tugas dilapangan, tentunya pihak Dinas Perhubungan melalui seksi manajemen dan kebutuhan lalu lintas jalan mengalami beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan tugas yang mereka jalankan, dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala dan dialami oleh Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikan tanggapan yang diberikan oleh informan penulis dilapangan yaitu bapak Kenmorito, ST yang menjabat selaku Kepala Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru, adapun tanggapan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Kendala yang kita hadapi dalam menjalankan tugas dibidang kebutuhan lalu lintas jalan ini salah satunya adalah anggaran yang terbatas, dimana dalam program yang kita jalankan ditahun 2019, itu anggaran yang kita dapat adalah sebanyak 200 Juta, hal ini tentunya akan membatasi kinerja kita dilapangan, khususnya dalam mencukupi kebutuhan peralatan dan bahan terkait rambu tersebut. (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Kenmorito, ST Kepala Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru)

Melanjutkan wawancara diatas, beliau juga menyampaikan tanggapannya terkait dengan hambatan diluar dari faktor anggaran, hal hal lain yang disampaikan adalah berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah, dimana hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Saya kira faktor lainnya adalah masalah dari kesadaran masyarakat kita sendiri, yang saya maksud disini adalah bagaimana kita menjaga fasilitas umum dilapangan, terkadang rambu lalu lintas yang kita pasang, tidak lama setelah kita pasang sudah rusak kembali atau bahkan hilang, salah satu contoh

adalah cermin jalan, dimana dalam kasus yang pernah kita alami, keberadaan cermin jalan tersebut hanya bertahan selama 3 haru saya, setelah dilakukan pemasangan, beberapa hari setelah itu kaca tersebut sudah pecah dan dilakukan pencoretan melalui pilok oleh oknum masyarakat, hal ini tentunya sangat mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan itu bisa berhasil atau tidak, khususnya dibidang kelengkapan fasilitas jalan ini. (Wawancara, 12 Maret 2020, Pukul 11.30 Wib, Kenmorito, ST Kepala Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor kendala yang paling mendasar yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas khususnya rambu lalu lintas jalan adalah masalah anggaran yang terbatas, dimana disebutkan bahwa alokasi dana anggaran untuk kebutuhan lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru hanya sebesar Rp 200.000.000,- saja, hal ini tentu tidak mencukupi untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi dilapangan, dan untuk memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal, maka kepala Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas mengatakan bahwa mereka harus mencari mana prioritas tugas yang harus dilakukan, dan memilih milih dengan cermat dalam mengeluarkan anggaran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui struktur tugasnya yaitu Seksi Manajemen Dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan Kota Pekanbaru belum mampu dilaksanakan dengan cukup baik, kesimpulan ini di buat berdasarkan fakta yang penulis temui dilapangan, dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan masih mengalami kendala di beberapa bidang, salah satunya adalah anggaran yang terbatas, berdasarkan fakta dilapangan yang disampaikan oleh informan penulis ditemukan fakta bahwa anggaran yang tersedia dalam proses pengadaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru masih sangat kecil, jumlah anggaran yang di alokasikan untuk menyediakan dan perawatan rambu lalu lintas adalah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Hal ini sangat membatasi kinerja dari masing-masing sektor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru, selain dari faktor anggaran yang terbatas, fakta lain yang mempengaruhi tugas dari Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan adalah kesadaran dari masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah, salah satunya adalah menjaga rambu lalu lintas jalan, dari laporan yang penulis dapatkan dikatakan bahwa rambu lalu lintas sering kali mengalami kerusakan yang disengaja oleh masyarakat, hal ini seperti pengrusakan terhadap kaca jalan, pencurian terhadap rambu lalu lintas, dan coret coret yang



dilakukan oknum masyarakat sehingga menutupi fungsi dari rambu lalu lintas tersebut.

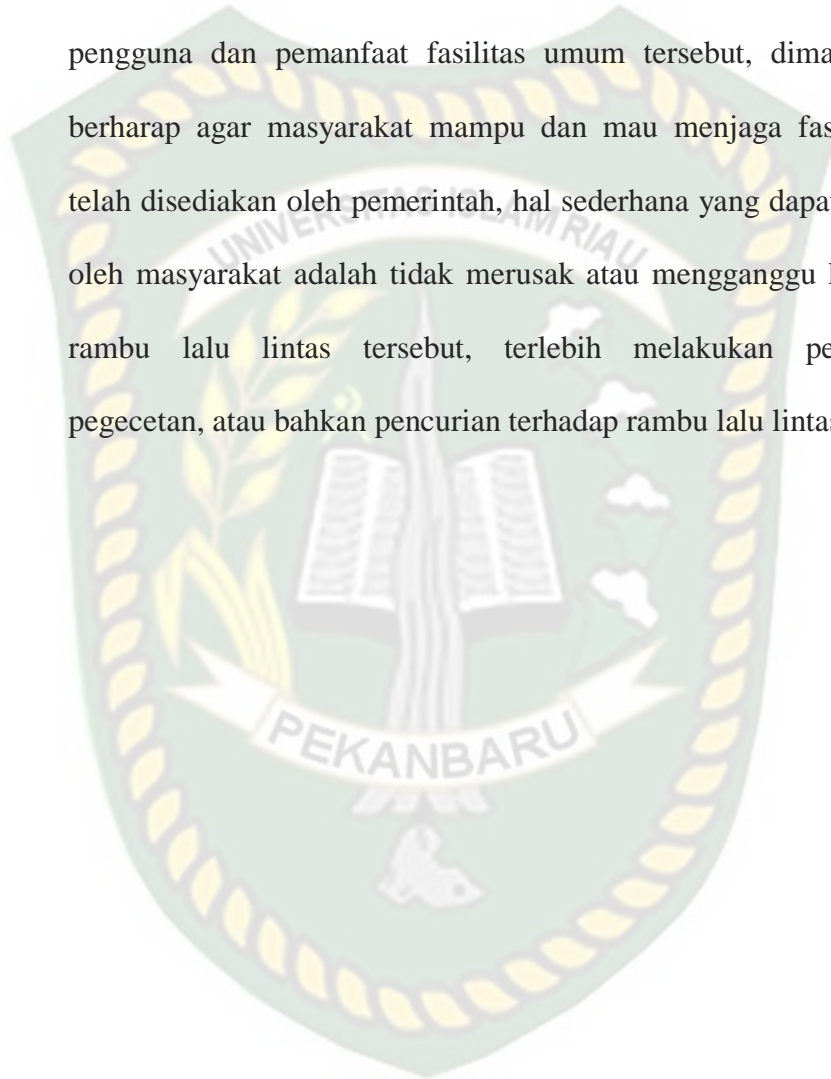
## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran-saran yang dapat membantu atau memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, dimana diantaranya adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan saran yang ingin penulis berikan adalah:

1. Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum, sudah seharusnya Dinas Perhubungan mempertimbangkan peningkatan jumlah anggaran yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas umum seperti rambu-rambu lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan ditemukan fakta bahwa masih banyak ruas jalan yang belum memiliki rambu lalu lintas, dan beberapa titik jalan ditemukan rambu lalu lintas yang sudah rusak di membutuhkan pergantian unit yang baru.
2. Saran selanjutnya yang penulis ingin berikan adalah berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap rambu lalu lintas yang telah tersedia, tentunya penulis berharap agar Dinas Perhubungan melalui Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan agar lebih memperharikan kondisi dari rambu lalu lintas yang tersedia saat ini, karna dalam observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta dilapangan yaitu kondisi rambu lalu lintas banyak yang sudah tidak maksimal lagi fungsinya, diantaranya adalah seperti rambu lalu

lintas yang tertutup pohon, kotor, cat usang, tanda sudah tidak relevan dengan kondisi jalan.

3. Saran yang terakhir tentunya diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna dan pemanfaat fasilitas umum tersebut, dimana penulis berharap agar masyarakat mampu dan mau menjaga fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, hal sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah tidak merusak atau mengganggu keberadaan rambu lalu lintas tersebut, terlebih melakukan pengrusakan, pegecetan, atau bahkan pencurian terhadap rambu lalu lintas tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiyono. 2004. *Statistika Dasar untuk Penelitian*. Surakarta: FKIP UNS Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Cresswel, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Cresswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Feriyanto Andri dan Endang Shyta. 2015. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Mediatara.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusdi. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Manulung Dan Marihot. 2002, *Manajemen Personalia*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo,.
- Pasolong. Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Purwanto. 2015. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian, P.S. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta

Siagian, S.P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*. Jakarta. Rineka Cipta.

Siagian, S.P. 2005. *Organisasi, Kepemimpinan, dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: CV.Haji Masagung.

Siswanto. Bejo. 2011. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono. A. G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Torang ,Syamsir: 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasidan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press

Zulkifli,2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. FISIPOL UIR Pekanbaru

## **B. Dokumentasi Penelitian**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru*

*Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*